

PERS RELEASE

REALISASI INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE JANUARI - DESEMBER TAHUN 2016

Mengawali tahun 2016, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan pencapaian target realisasi investasi daerah sebesar Rp. 39,33 triliun berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2025. Target tersebut sudah mengantisipasi pencapaian target RPJMD dengan rincian Rp 13,77 triliun untuk PMDN dan Rp 25,56 triliun untuk PMA.

Namun seiring perkembangan kondisi ekonomi nasional yang rentan terhadap krisis ekonomi global, maka ini berdampak ikutan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur yang tidak berkembang pesat seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 pertumbuhannya (Y ON Y) -0,30%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari struktur ekonomi Kalimantan Timur sendiri yang lebih berorientasi keluar negeri (ekspor – impor), dengan mengandalkan komoditi ekstraktif. Lemahnya permintaan komoditi tersebut, terutama migas, batu bara dan CPO, yang diimbangi dengan kecenderungan penurunan (“fluktuasi”) harga internasional atas ke-3 komoditi tadi, maka secara akumulatif memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu indikasi penyebab lemahnya minat para investor untuk merealisasikan rencana investasi di Kalimantan Timur yang telah disetujui, baik persetujuan investasi dalam bentuk PMA ataupun PMDN, sehingga pada tahun 2016 ini realisasi investasi hanya mencapai Rp 23,31 triliun atau mencapai 59,27 % dari target. Capaian realisasi ini sangat berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana capaian target realisasi selalu melebihi rencana yang telah ditetapkan.

Namun demikian, daya tarik keuntungan komparatif Kalimantan Timur tetap menjadi stimulan positif terhadap minat investasi; ini dibuktikan dari persetujuan investasi berupa PMDN dan PMA yang masih cukup tinggi. Berdasarkan catatan BKPM sampai dengan akhir Desember 2016 telah tercatat persetujuan (“rencana”) investasi sebesar Rp. 165,70 triliun dengan total proyek sebanyak 360 paket, yang terinci sebagai berikut; berupa PMDN sebesar Rp.56,22 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 317 paket dan berupa PMA sebesar Rp. 109,48 triliun dengan jumlah proyek 43 paket. Nilai persetujuan/rencana investasi ini merupakan rujukan dalam perhitungan realisasi investasi di daerah; dan ini sangat bergantung pada kemampuan dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif berupa dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, insentif investasi, tenaga kerja yang terampil serta layanan birokrasi yang cepat dan minim biaya, tanpa mengandalkan sepenuhnya keuntungan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam semata.

Tidak tercapainya realisasi investasi tahun 2016 akan lebih memacu upaya mencapai target akumulatif realisasi di tahun-tahun berikutnya dalam rangka mencapai target RPJMD diakhir tahun 2018 mendatang, termasuk mengevaluasi ulang target realisasi RUPM, sehubungan dengan sudah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, dimana target RUPM

sebelumnya masih berdasarkan data-data investasi yang sepenuhnya tercakup dalam wilayah administratif Kalimantan Utara.

Adapun gambaran selengkapnya capaian realisasi investasi tahun 2016, baik dilihat dari sebaran lokasi maupun sebaran sektor usaha-nya, berupa PMDN dan PMA sebagai berikut.

A. Realisasi Investasi

1. Realisasi Investasi PMDN

1.1. Realisasi Investasi berdasarkan Lokasi

Hingga triwulan IV tahun 2016, realisasi investasi untuk PMDN mencapai Rp 6.885,12 milyar, dengan jumlah proyek sebanyak 243 paket, dimana berdasarkan sebaran lokasi-nya bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi. Penambahan investasi paling besar terjadi di Kabupaten Kutai Barat, yaitu mencapai Rp 2.149,92 milyar atau 31,23 % dari keseluruhan realisasi investasi.

Kabupaten lain yang juga mencatatkan nilai investasi tinggi adalah Kutai Timur, Berau dan Penajam Paser Utara. Bahkan di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan adanya tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang paling banyak, yaitu sebesar 14.877 orang atau 51,26 % dari keseluruhan serapan TKI, walaupun jumlah proyek-nya hanya 29 paket. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi proyek tersebut bersifat intensif tenaga kerja (*labour intensive*), yang umumnya berbasis sektor usaha ekstraktif berupa perkebunan.

Tabel 1
Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Sebaran Lokasi-nya di Kalimantan Timur Periode Januari - Desember Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	REALISASI			
		PROYEK (PAKET)	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA (ORG)	
				TKI	TKA
1	SAMARINDA	15	2,000,000,000	83	1
2	BALIKPAPAN	27	255.037.600.000	214	-
3	KUTAI KARTANEGARA	36	521.773.600.000	1.129	2
4	BONTANG	17	456,530,500,000	346	-
5	KUTAI TIMUR	53	1,405.387.900.000	6.467	11
6	PENAJAM PASER UTARA	23	697.635.000.000	1.087	1
7	PASER	12	236.087.500.000	265	6
8	KUTAI BARAT	29	2.149.922.400.000	14.877	8
9	BERAU	31	1.160.750.700.000	4.555	1
10	MAHAKAM HULU	-	-	-	-
T O T A L		243	6.885.124.600.000	29.023	30

Sumber : Diolah dari data BKPM.

1.2 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Selanjutnya, berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dapat dicapai sampai dengan triwulan IV atau akhir Desember tahun 2016 terdapat sejumlah sub sektor usaha yang mengalami penambahan investasi, dimana Tanaman, Pangan dan Perkebunan memberikan kontribusi hingga mencapai Rp 2.496,17 milyar atau 36,25 %. Sub sektor ini juga cukup banyak menyerap tenaga kerja, yaitu mencapai 20.583 orang atau 70,92% dari total penyerapan TKI.

Sub sektor lain yang juga berkontribusi cukup besar dalam mendukung pencapaian realisasi investasi Kalimantan Timur hingga triwulan IV ini adalah Industri Makanan dengan nilai investasi Rp1.847,14 milyar atau sebesar 26,83 %.

Tabel 2
Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari - Desember Tahun 2016

NO	SEKTOR/SUB SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK (PAKET)	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA (ORG)	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	75	2,496,175,000,000	20.583	-
2	Peternakan	-	-	-	-
3	Kehutanan	2	8.050,100,000	758	-
4	Pertambangan	16	599,560,600,000	2,098	12
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	35	1,847,135,700,000	3,624	-
2	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	24	466.848.700,000	452	-
3	Industri Mineral Non Logam	8	8,893,300,000	30	-
4	Industri Alat Angkutan & Transportasi Lainnya	2	5,900,000,000	-	-
5	Industri Lainnya	3	78,643,400,000	3	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas & Air	10	324,544.200,000	448	-
2	Konstruksi	1	-	-	-
3	Perdagangan & Reparasi	13	69.294,600,000	102	-
4	Hotel & Restoran	11	-	8	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	7	183.970,500,000	288	3
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	7	6,560,200,000	2	-
7	Jasa Lainnya	16	407,544.100,000	304	13
TOTAL		243	6.885,124.600.000	29.023	30

Sumber : Diolah dari data BKpm.

2. Realisasi Investasi PMA

2.1 Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi investasi PMA hingga triwulan IV atau akhir Desember 2016 mencapai USD 1,181.86 juta, tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Balikpapan masih menjadi kontributor paling signifikan dengan nilai USD 401,81 juta atau sebesar 34,00 %, yang mencakup 116 proyek.

Sementara untuk penyerapan tenaga kerja paling besar atas realisasi investasi PMA terjadi di Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebanyak 8.239 orang atau 37,11% dari total tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada, Fakta seperti ini masih ada kaitannya dengan sub sektor perkebunan dan pertambangan batu bara yang dominan dalam mendukung pencapaian realisasi investasi PMA, dimana Kutai Timur selama ini cukup banyak diminati investor dari luar negeri (asing). Sementara tenaga kerja asing (TKA) yang terserap hanya 55 orang dari 66 proyek yang bernilai USD 289.15 juta.

Sebaliknya, untuk penyerapan TKA paling banyak pada tahun 2016 ini adalah Kabupaten Kutai Barat, yaitu berjumlah 142 orang atau 40,57% dari total TKA, walaupun realisasi investasi PMA-nya hanya USD 67,08 juta.

Tabel 3
Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sebaran Lokasi-nya di Kalimantan Timur Periode Januari - Desember Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	REALISASI			
		PROYEK (PAKET)	INVESTASI (USD)	TENAGA KERJA (ORG)	
				TKI	TKA
1	SAMARINDA	39	15,685,600	592	22
2	BALIKPAPAN	116	401.808.600	1.844	41
3	KUTAI KARTANEGARA	99	124,770,900	2.332	32
4	BONTANG	26	9,833,000	187	-
5	KUTAI TIMUR	66	289,147,000	8.239	55
6	PENAJAM PASER UTARA	15	18,052,800	1.798	4
7	PASER	20	27,961,600	383	3
8	KUTAI BARAT	38	67.079,600	4.100	142
9	BERAU	48	185,268,700	1,947	49
10	MAHAKAM HULU	4	42.251,400	782	2
TOTAL		471	1.181.859.200	22.204	350

Sumber : Diolah dari data BKPM.

2.2 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Berbeda dengan kondisi PMDN, dimana realisasi investasi menurut sektor usaha PMA ini, sub sektor Pertambangan menjadi kontributor paling tinggi dengan mendapatkan tambahan investasi sebesar USD 449.98 juta atau sebesar 38,07 % dari keseluruhan realisasi PMA. Sub sektor lain yang juga cukup kontributif adalah Tanaman Pangan dan Perkebunan, yaitu sebesar USD 344.59 juta atau 29,16%, dan berikutnya berasal dari sub sektor Industri Makanan, yaitu sebesar USD 207.86 juta atau 17,59%.

Hingga akhir bulan Desember 2016 ini, secara keseluruhan realisasi PMA yang mencapai USD 1,181.86 juta, penyerapan tenaga kerja yang ada terdistribusikan pada sub sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan yang menyerap tenaga kerja mencapai 13.447 orang atau 60,56% dari jumlah tenaga kerja yang diserap melalui tambahan investasi PMA, yaitu mencapai 22.554 orang (TKI dan TKA). Ini membuktikan bahwa sub sektor ini pada umumnya masih merupakan penyangga serapan tenaga kerja (*labour*

intensive), walaupun jumlah proyek yang berkontribusi dalam menambah realisasi investasi hanya 79 proyek.

Sub sektor lain yang juga menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor sekunder, terutama dari sub sektor Industri Makanan yang mencapai 4.224 orang atau 19,02% dari total TKI dan TKA yang terserap. Khususnya dilihat dari penyerapan TKA, menempatkan sub sektor Industri Makanan relatif lebih tinggi penyerapannya dibandingkan sub sektor lain, yaitu sebesar 107 orang atau 30,57% dari total TKA.

Tabel 4
Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari - Desember Tahun 2016

NO	SEKTOR/SUB SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK (PAKET)	INVESTASI (USD)	TENAGA KERJA (ORG)	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	79	344.588,200	13.447	46
2	Peternakan	2	3.900	-	-
3	Kehutanan	9	9.304,600	460	4
4	Pertambangan	101	449.980,500	2.350	81
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	69	207,862.100	4.224	107
2	Industri Kayu	18	7.906,900	39	7
3	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	15	10,313,800	232	21
4	Industri Karet & Plastik	3	39.000	36	2
5	Industri Mineral Non Logam	7	27.487.300	10	-
6	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & Elektronik	8	75.719.600	11	4
7	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	6	128.800	27	1
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas & Air	18	26.542,700	555	11
2	Konstruksi	3	-	-	-
3	Perdagangan & Reparasi	48	6,121,500	198	3
4	Hotel & Restoran	27	1.592.600	320	10
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	15	10.125,300	137	30
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	10	1,674.700	18	2
TOTAL		471	1.181.859.200	22.204	350

Sumber : Diolah dari data BKPM.

Berbeda dengan sub sektor Pertambangan yang merupakan sub sektor ke-2 terbesar pencapaian realisasi investasi PMA, dengan jumlah proyek sebanyak 101 proyek, namun hanya menyerap TKI dan TKA sebanyak 2.431 orang atau 10,78%. Faktor penyebabnya adalah sifat industri-nya adalah padat modal (*capital intensive*), selain disebabkan sistem kerja "*outsourcing*" untuk kegiatan tertentu dibidang penambangan batu bara, sehingga penyerapan tenaga kerjanya tidak tercatat secara langsung di sub sektor ini.

3. Akumulasi Realisasi Investasi PMDN dan PMA

Berdasarkan penjelasan yang telah diutarakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hingga bulan Desember 2016, realisasi investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp. 23,31 triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp.6,88 triliun dan PMA sebesar Rp. 16,43 triliun yang jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2016 hanya mencapai angka 59,27 %, karena target yang ditetapkan Rp 39,33 triliyun menurut RUPM (RPJMD). Sementara menurut target BKPM sendiri diprediksikan realisasi investasi untuk Kalimantan Timur pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 30,16 triliyun, sehingga pencapaian tingkat realisasi yang dicapai 77,29 %

Tabel 5
Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode Januari - Desember Tahun 2016

NO	URAIAN	TAMBAHAN INVESTASI s/d TRW IV	PROYEK (PAKET)	SERAPAN TENAGA KERJA (ORG)
1	PMDN (Rp)	6.885.124.600.000	243	29.053
2	PMA			
	2.1. Dinilai dalam USD	1,181,859.200	471	22.554
	2.2. Dinilai Dlm Rp ¹⁾	16.427.842.880.000		
Total (dalam Rp) – 1 + 2.2		23.312.967.480.000	714	51.607

Keterangan : ¹⁾ Dikonversikan pada kurs Rp 13.900,-/US \$.

Sumber : Diolah dari data BKPM.

Pada tingkat nasional realisasi investasi PMDN pada tahun 2016 menempati **urutan ke 9**, setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DIY, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk PMA berada pada urutan **ke-8**, setelah Provinsi Jawa Barat, DIY, Banten, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Papua. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa **prestasi Kalimantan Timur masih berada dalam peringkat 10 besar nasional** (lihat Tabel 7). Fakta ini menjadi isyarat bahwa minat investor untuk merealisasikan rencana investasinya masih cukup tinggi, sehingga kedepannya diprediksikan akan mengalami peningkatan sejalan dengan nilai membaiknya ekonomi nasional serta kenaikan cukup berarti harga komoditas batu bara dan CPO.

Tabel 6
Tingkat Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2015

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
(1) Target (triliun Rp)	33,00	35,00	37,10	39,33	34,97
(2) Realisasi (triliun Rp)	31,71	37,87	39,38	23,31	---
(3) Tingkat Realisasi (%) – (1) / (2)	96,09%	108,2%	106,1%	59,27%	---

Sumber : Diolah dari data BKPM dan RUPM Prov. Kaltim.

Sesuai perodesasi RPJMD 2013 – 2018, data historis pencapaian realisasi investasi menunjukkan kenaikan cukup berarti, dan bahkan tingkat realisasinya selalu melebihi target (> 100 %). Capaian realisasi ini tidak terlepas dari masih terkonsolidasikannya data perusahaan dalam satu Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, namun sejak berdirinya Provinsi Kalimantan Utara secara efektif pada tahun 2014 pihak BKPM sudah melakukan pemisahan data perusahaan, sementara RUPM Provinsi Kalimantan Timur belum direvisi, masih cukup tinggi target realisasi investasinya. Pada tahun 2017 sudah dilakukan revisi target dimaksud, disesuaikan dengan target BKPM.

Tabel 7
Peringkat Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

PMDN				PMA			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK	NO	LOKASI	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	Jawa Timur	46.331,6	1.119	1	Jawa Barat	5.470,9	5.369
2	Jawa Barat	30.360,2	1.169	2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3.398,2	6.751
3	Jawa Tengah	24.070,4	984	3	Banten	2.912,1	2.161
4	Banten	12.426,3	496	4	Sumatera Selatan	2.793,5	251
5	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	12.216,9	463	5	Jawa Timur	1.941,0	1.473
6	Kalimantan Barat	9.015,5	289	6	Sulawesi Tengah	1.600,3	252
7	Sumatera Selatan	8.534,1	165	7	Papua	1.168,4	169
8	Kalimantan Tengah	8.179,1	121	8	Kalimantan Timur	1.139,6	466
9	Kalimantan Timur	6.885,1	239	9	Jawa Tengah	1.030,8	1.054
10	Riau	6.613,7	289	10	Sumatera Utara	1.014,7	688

Sumber : Diolah dari data BKPM.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi investasi tahun 2016 selengkapya adalah; *Pertama*, secara makro berhubungan dengan masih melemahnya kondisi perekonomian daerah, sejalan dengan turunnya permintaan dari harga komoditas yang selama ini menjadi unggulan Kalimantan Timur; *Kedua*, secara administratif target realisasi relatif tinggi, sebagai implikasi belum dilakukannya revisi target RUPM, terkait dengan belum dilakukannya pemilihan data perusahaan yang berada di Kalimantan Utara. Dan *ketiga* adalah faktor-faktor teknis berikut ini :

- Masih banyak perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga banyak data realisasi investasi yang belum terdata, walaupun perusahaan tersebut sudah merealisasikan kegiatan investasi dilapangan.
- Selain itu adanya kewajiban perusahaan untuk melaporkan LKPM harus menyampaikan secara online. Sementara masih banyak perusahaan yang belum mendapatkan hak akses untuk pelaporan LKPM secara online tersebut, sehingga berimplikasi terhadap masih rendahnya jumlah LKPM yang dilaporkan, padahal data LKPM inilah yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi.

- c. Rendahnya penyampaian LKPM pertriwulan menjadi indikasi adanya penyesuaian rencana investasi, yang bukan berarti batalnya rencana investasi dimaksud, namun secara teknis hanya terkait dengan penyesuaian waktu saja, sehingga berpengaruh terhadap pergeseran waktu realisasi investasi di tahun mendatang,
- d. Data LKPM yang sudah disampaikan secara manual (hard copy) ke BKPM masih perlu diklarifikasikan lebih lanjut, sehingga pencatatan realisasinya baru dapat dilakukan tahun 2017 mendatang, dimana pokok permasalahannya terletak pada :
 - Tidak konsistennya data realisasi yang disampaikan perusahaan, yang umumnya berhubungan dengan perubahan petugas diperusahaan yang diberikan tanggungjawab mengelola LKPM.
 - Besaran angka realisasi yang disampaikan perusahaan tidak ada back up data penunjangnya.
 - Adanya penggabungan data LKPM (konsolidasi) untuk perusahaan yang berada dalam satu kelompok perusahaan, sehingga masih perlu dilakukan pemisahan untuk memastikan jumlah riil investasi proyek bersangkutan berdasarkan Persetujuan Prinsip/Usaha Penanaman Modal yang telah dikeluarkan BKPM maupun DPMPTSP.

B. Strategi Pencapaian Target Realisasi Investasi Tahun 2017

Sebagaimana telah dicanangkan dalam RUPM untuk tahun 2017 target investasi adalah sebesar Rp. 41,69 triliun (sebelum revisi). Menilik pada beberapa pertimbangan sebagaimana telah diutarakan diatas, terutama;

1. Keharusan dilakukannya pemisahan antara target realisasi investasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Utara, sehingga berdampak terhadap besaran target realisasi investasi tahun-tahun mendatang ;
2. Perlunya dilakukan sinkronisasi penetapan target realisasi sesuai perencanaan (Renstra) BKPM, yang umumnya sudah memperhitungkan prospektif perekonomian nasional ;
3. Sementara perekonomian daerah sendiri diasumsikan mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan, karena mulai membaiknya permintaan dan harga komoditas migas, batu bara dan CPO, sehingga diperkirakan sub sektor perkebunan dan pertambangan akan mengalami peningkatan ;
4. Dari aspek fiskal daerah, walaupun terjadi penurunan APBD, akan tetapi kebijakan untuk memprioritaskan belanja infrastruktur diperkirakan tetap menjadi stimulan untuk menumbuhkan iklim investasi daerah ;

Berdasarkan ke-4 alasan diatas maka realisasi investasi Kalimantan Timur tahun 2017 ditargetkan sebesar **Rp 34,97** triliun. Untuk mencapai target tersebut, maka upaya dan strategi yang akan ditempuh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Promosi investasi dan *Bussines Matching* dengan Mitra Strategis
Untuk lebih meningkatkan minat dari calon investor, DPMPTSP mengemas promosi investasi dengan sangat serius. Data dan informasi dikompilasi dan dikemas sebaik mungkin. Terhadap potensi investasi dilakukan kajian pendahuluan setingkat pra-studi kelayakan (Pra-FS) untuk dapat menjadi informasi peluang investasi yang cukup memadai bagi calon investor dalam mengambil keputusan investasinya. Untuk investor yang sudah sangat serius, DPMPTSP akan memfasilitasi business matching antara calon investor tersebut dengan SKPD teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota serta rekan dunia usaha potensial yang dapat menjadi mitra.
2. Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang transparan dan cepat.
Pelayanan perijinan merupakan pintu gerbang bagi masuknya investasi di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan perijinan terus dilakukan dari segi kewenangan, kelembagaan, sarana prasarana hingga dukungan percepatan pelayanan perizinan melalui pembuatan peraturan yang memudahkan bagi para investor dalam melakukan pelayanan perizinan serta memberikan percepatan bagi izin yang khusus dalam waktu 3 jam.
3. Mendorong Realisasi Investasi dengan mengoptimalkan LKPM
Meningkatnya realisasi investasi, baik jumlah proyek, nilai investasi, maupun serapan tenaga kerja, menjadi indikator mutlak bagi berhasil tidaknya program peningkatan investasi. Kunci dari hal ini adalah tertibnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Salah satu upaya untuk tertibnya penyampaian LKPM, yaitu dengan memberikan surat pada perusahaan PMA dan PMDN terkait kewajibannya dalam menyampaikan LKPM disetiap triwulan/semester, sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dengan cara :
 - Sosialisasi penggunaan LKPM online kepada setiap perusahaan agar bisa dipastikan pelaporan data realisasi investasi secara benar dan tepat waktu.
 - DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur akan mensosialisasikan kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam penggunaan Sistem Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan juga hak akses demi kelancaran realisasi investasi.
4. Melakukan Pembinaan dan Pemantuan
Melakukan pembinaan terhadap perusahaan dalam hal pencapaian realisasi investasi dan penyampaian LKPM, karena masih banyaknya perusahaan yang belum menyampaikan LKPM-nya, terutama di DPMPTS Kabupaten/Kota dimana perusahaan itu berlokasi. Diperolehnya informasi dari BKPM berkenaan dengan daftar/list perusahaan (PMDN) yang disurati oleh BKPM untuk wilayah Kalimantan Timur, agar DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dapat menyurati perusahaan

(PMDN) diluar list tersebut, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menghimbau kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak melaporkan realisasi investasi kepada pemerintah.

5. Penggunaan Jalur Hijau

Mendorong perusahaan memanfaatkan jalur hijau, dimana BKPM RI telah memberikan solusi, dengan penggunaan jalur hijau ini kepada setiap perusahaan yang akan melakukan produksi untuk mendapatkan kemudahan dalam mengimpor/bea masuk terhadap barang modalnya, terutama pada pemeriksaan oleh tim dari bea cukai, sehingga jangka waktunya bisa lebih cepat/efisien.

6. Penyampaian Surat Peringatan

Memberikan surat peringatan kepada setiap perusahaan yang tidak aktif melaporkan LKPM online.

7. Kebijakan Daerah yang Pro-Investasi

Iklim investasi akan terus tumbuh dan dinamis jika didukung dengan peraturan yang jelas dan transparan. Selain telah diterbitkannya peraturan mengenai perijinan penanaman modal dan sektoral yang dilaksanakan secara terpadu di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, calon investor yang serius juga akan memperoleh sejumlah fasilitas dan insentif penanaman modal seperti tax allowance dan tax holiday. Saat ini telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah.

Demikian disampaikan, semoga kedepannya iklim investasi/usaha di Kalimantan Timur dapat terus tumbuh dinamis, membuka banyak lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan kawasan, meningkatkan harkat dan derajat hidup masyarakat, serta membuka keterisolan dengan menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru.

Kepala

Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640627 199003 1 006

Informasi Lebih Lanjut :

Bidang Penegndalian dan Pelaksanaan DPMPTSP Provinsi Kaltim

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Samarinda 75117

Telp (0541) 743235 - 743487 fax (0541) 736446

Website : <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id>

Email : humas@dpmptsp.kaltimprov.go.id dan humas.bppmdkaltim@gmail.com